

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	31
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	33
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	35
3.3 Program dan Kegiatan.....	36
BAB IV RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT.....	56
4.1 Program dan Kegiatan.....	56
4.2 Pendanaan Indikatif.....	58
BAB V PENUTUP.....	59
LAMPIRAN RENJA 2023 DARI SIPD	

DAFTAR TABEL

Tabel TC.29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan s/d Tahun 2021.....	12
Tabel TC.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balige.....	19
Tabel TC.31 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Balige Tahun 2023.....	24
Tabel TC.32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023.....	32
Tabel TC.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2023.....	38
Tabel TC.33A Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Balige Tahun 2023	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan adalah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 226, Camat mendapatkan pelimpahan tugas sebagai kewenangan Bupati dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Disamping itu Camat juga melaksanakan tugas pemerintahan umum dan kewenangan dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas lainnya yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan Perda;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di kecamatan;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan dan atau kelurahan;
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, dan
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balige Tahun 2023 merupakan rencana tahun ketiga dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Balige 2021-2026. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balige Tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Bupati Toba Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Toba Tahun 2023,

dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Balige untuk pelaksanaan Kegiatan tahun 2023.

Secara umum Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balige Tahun 2023 memuat kebijakan dan kegiatan yang merupakan penjabaran dan implementasi serta pemberdayaan aparatur dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan pelaksanaan tugas pelimpahan kewenangan dari Bupati Toba. Uraian ini akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2022 serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2023. Termasuk isu-isu strategis yang ikut mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja. Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2023 dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Tahun 2001-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba dengan visi “TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR”.

RENJA Kecamatan Balige mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi Kecamatan Balige yang memuat kebijakan publik yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA yang merupakan bagian dari APBD Kabupaten Toba karena memuat Program dan Kegiatan Kecamatan Balige selama satu tahun;
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Kecamatan Balige sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana APBD Kabupaten Toba.

Kedudukan RENJA Kecamatan Balige merupakan bagian penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RENSTRA) Kecamatan Balige Tahun 2021-2026 dan Dokumen RENJA Kecamatan Balige tahun 2023 ini dilengkapi dengan lampiran- lampiran yang antara lain berisi uraian tentang Program dan Kegiatan beserta indikasi pagu untuk masing- masing Program yang didasarkan atas pagu indikatif.

Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah adalah turunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menjadi satu kesatuan atau salah satu bidang sebagai fungsi pemerintahan yang menjadi tanggung jawab sebuah unit kerja;

- b. RENSTRA OPD dibuat dengan menggunakan RPJMD sebagai acuan dan harus dilakukan melalui koordinasi antar unit kerja dengan Bappeda guna memastikan bahwa jumlah RENSTRA OPD harus termuat dalam RPJMD;
- c. RENSTRA OPD disusun dengan berbedoman pada tugas pokok dan fungsi oleh OPD sebagai salah satu perangkat daerah;
- d. RENSTRA OPD dilengkapi dengan Matriks Rencana Program dengan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun;
- e. Sebagai turunan RENSTRA OPD untuk Perencanaan Tahunan maka disusunlah RENJA Organisasi Perangkat Daerah dengan matrik kegiatan selama 1 (satu) tahun;
- f. RENJA OPD disusun sesuai dengan Matrik Rencana Program Lima Tahun dengan mengutip sesuai dengan tahun perencanaan;
- g. Selanjutnya RENJA tersebut dipergunakan sebagai acuan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
- h. Dengan penjelasan di atas, Rencana Kerja (RENJA) ini memberikan gambaran yang jelas apa yang akan dilaksanakan oleh OPD selama 1 (satu) tahun kemudian dengan program yang mengacu pada RPJM dan bagian dari Renstra sehingga kegiatan berkelanjutan dan lebih terarah untuk mencapai sasaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENJA Kecamatan Balige Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 – 2026;
24. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toba Samosir;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017-2037;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
27. Peraturan Bupati Toba Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balige Tahun 2023 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balige Tahun 2023 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Balige Tahun 2023 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balige Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA PROGRAM DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

4.1 Program dan Kegiatan

4.2 Pendanaan Indikatif

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Pada Tahun 2021 Kecamatan Balige melaksanakan 15 (lima belas) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan dengan perkiraan capaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2021 mencapai 100%. Sedangkan, capaian kinerja 15 program sampai dengan Triwulan II mencapai 17% dengan predikat SR (Sangat Rendah), hal ini terjadi sebagai akibat/dampak dari beberapa kegiatan yang belum semuanya terlaksana, dan juga akibat refocusing anggaran dengan adanya Pandemic COVID-19 yang masih melanda sampai saat ini. Selain itu, ada beberapa program dan kegiatan yang belum terealisasi karena direncanakan pada Triwulan selanjutnya. Dan rata-rata capaian kinerja Renstra Tahun 2021 sebesar 100% dengan predikat ST (Sangat Tinggi).

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Balige untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan juga mengalami faktor penghambat yang harus dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
2. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait:
 - 1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
 - 2) Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan.

Sedangkan faktor pendukung yang mendukung kelancaran di Kecamatan Balige, antara lain:

1. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
2. Adanya Komitmen Bupati dalam peningkatan prasarana wilayah, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik;
3. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada **Tabel TC.29** berikut:

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kabupaten Toba

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021						Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022			
			K	Rp	K	Rp	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11= (10/4)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	100	1.782.850.363	0	106.403.250	0	2.476.884.754	0	370.129.745	15%	0,1494		354.000.000		830.532.995	47%	0,465846
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	889.850.363	0	52.390.600	0	1.423.196.940	0	19.658.740	1%	0,0138		172.000.000		244.049.340	27%	0,274259
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7	889.850.363		52.390.600	9 Kegiatan	1.423.196.940,00		19.658.740	1%	0,0138	7	172.000.000	0	244.049.340	27%	0,274259
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	100	893.000.000	0	54.012.650	0	1.053.687.814	0	350.471.005	33%	0,3326		182.000.000		586.483.655	66%	0,656757
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Persentase jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	100	893.000.000		54.012.650	72 Bulan	1.053.687.814,00		350.471.005	33%	0,3326	3	182.000.000	0	586.483.655	66%	0,656757

		Persentase Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan	100	24.146.259.166	0	4.093.936.099	12	18.980.429.450	0	2.797.901.947	15%	0,1474		4.635.500.000		11.527.338.046	48%	0,477396
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100	24.146.259.166	0	4.093.936.099	12	18.980.429.450	0	2.797.901.947	15%	0,1474		4.635.500.000		11.527.338.046	48%	0,477396
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan	100	1.310.359.166	0	59.054.100	0	980.429.450	0	0	0%	-		255.500.000		314.554.100	24%	0,240052
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa/ Kelurahan	100	389.450.281		26.600.000	35 Desa/Kel	503.429.450,00			0%	-	100	75.500.000	0	102.100.000	26%	0,262164
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Pembinaan Organisasi Kelembagaan Desa/Kelurahan	14	920.908.885		32.454.100	19 Desa	477.000.000,00			0%	-	100	180.000.000	0	212.454.100	23%	0,2307
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	6	22.835.900.000	0	4.034.881.999	12	18.000.000.000	0	2.797.901.947	16%	0,1554		4.380.000.000		11.212.783.946	49%	0,491016
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah infrastruktur/sarana/prasarana kelurahan yang dibangun	90	5.170.400.000		3.722.489.859	6	14.200.000.000,00		795.714.895	6%	0,0560	6	980.000.000	0	5.498.204.754	106%	1,0634
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melakukan kegiatan pemberdayaan	6	17.665.500.000		312.392.140	6	3.800.000.000,00		2.002.187.052	53%	0,5269	36	3.400.000.000	0	5.714.579.192	32%	0,323488
		Persentase layanan administrasi Pemerintahan Umum	100	146.000.000	0	0	0	0	0	0				27.000.000		27.000.000	18%	0,184932

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen Desa/Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	100	146.000.000	0	0	0	0	0	0			27.000.000		27.000.000	18%	0,184932	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100	146.000.000	0	0	0	0	0	0			27.000.000		27.000.000	18%	0,184932	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pembayaran honorarium FORKOPIMCA	5	146.000.000									12	27.000.000	0	27.000.000	18%	0,184932
		Persentase Desa yang melaksanakan integrasi, sinergi, dan terobosan dalam pemerintahan Desa	100	324.600.000	0	26.784.650	0	390.500.000	0	52.050.000	13%	0,1333		57.000.000		135.834.650	42%	0,418468
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen Desa tertib administrasi Pemerintahan Desa	100	324.600.000	0	26.784.650	0	390.500.000	0	52.050.000	13%	0,1333		57.000.000		135.834.650	42%	0,418468
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi	29	324.600.000	0	26.784.650	0	390.500.000	0	52.050.000	13%	0,1333		57.000.000		135.834.650	42%	0,418468
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan Perkades yang dievaluasi	290	147.300.000									58	26.000.000	3	26.000.000	18%	0,176511
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa yang difasilitasi Kecamatan	29	177.300.000		26.784.650	72 Bulan	390.500.000,00		52.050.000	13%	0,1333	35	31.000.000	3	109.834.650	62%	0,619485
		Persentase layanan administrasi yang tertangani	100	41.339.411.840		41.339.411.842		41.339.411.844		41.339.411.846	100%	1,0000		41.339.411.846		124.018.235.535	300%	3
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100	41.339.411.840	0	480.748.358	726	4.598.443.500	0	1.639.126.521	36%	0,3565		7.840.569.484		9.960.444.363	24%	0,240943

7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	295.400.000	0	0	0	0	0	19.946.212				56.800.000		76.746.212	26%	0,259804
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50	125.500.000								10	24.000.000	5	24.000.000	19%	0,191235	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	RKA SKPD	5	11.100.000								1	2.200.000	1	2.200.000	20%	0,198198	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Perubahan RKA SKPD	5	11.100.000								1	2.200.000	1	2.200.000	20%	0,198198	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	DPA SKPD	5	11.100.000								1	2.200.000	1	2.200.000	20%	0,198198	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Perubahan DPA SKPD	5	11.100.000								1	2.200.000	0	2.200.000	20%	0,198198	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan Realisasi Kinerja	48	125.500.000						19.946.212		10	24.000.000	5	43.946.212	35%	0,350169	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	100	30.464.780.367	0	0	0	0	0	0				5.755.800.000		5.755.800.000	19%	0,188933
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	70	30.464.780.367								65	5.755.800.000	25	5.755.800.000	19%	0,188933	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	100	61.166.163	0	0	0	0	0	0				20.000.000		20.000.000	33%	0,326978

7.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas	165	61.166.163								80	20.000.000	0	20.000.000	33%	0,326978	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100	3.739.676.067	0	175.265.545	654	1.769.925.500	0	861.374.980	49%	0,4867	705.500.000		1.742.140.525	47%	0,465853	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350	787.876.067		44.012.840	408	663.225.500,00		613.509.110	93%	0,9250	70	149.000.000	0	806.521.950	102%	1,023666
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	450	282.000.000		15.219.020	234	105.000.000,00		47.128.870	45%	0,4488	82	53.000.000	0	115.347.890	41%	0,409035
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetakan dan penggandaan	10	326.800.000		21.362.985	12	141.500.000,00		63.206.000	45%	0,4467	2	63.500.000	0	148.068.985	45%	0,453087
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	75	171.500.000		8.350.000	30 Media	76.200.000,00			0%	-	15	34.000.000	0	42.350.000	25%	0,246939
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kunjungan Tamu	60	666.500.000									12	126.000.000	0	126.000.000	19%	0,189047
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	8670	1.505.000.000		86.320.700	72 Bulan	784.000.000,00		137.531.000	18%	0,1754	1630	280.000.000	0	503.851.700	33%	0,334785
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	100	1.178.200.000	0	2.826.000	0	688.060.000	0	139.704.080	20%	0,2030	213.500.000		356.030.080	30%	0,302181	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	7	222.000.000									1	34.000.000	0	34.000.000	15%	0,153153

7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Mebel	675	827.000.000			12 Jenis	95.560.000,00		139.704.080	14%	1,4620	127	155.000.000	0	294.704.080	36%	0,356353
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	415	129.200.000		2.826.000	29 Jenis	592.500.000,00			0%	-	75	24.500.000	0	27.326.000	21%	0,211502
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100	3.925.641.761	0	236.280.033	72	1.459.158.000	0	489.452.427	34%	0,3354		742.969.484		1.468.701.944	37%	0,37413
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	1	20.415.177									1	3.815.177	1	3.815.177	19%	0,186879
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	1.082.171.075		33.123.693	72	411.200.000,00		116.319.627	28%	0,2829	4	202.523.475	1	351.966.795	33%	0,325241
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	47	2.823.055.508		203.156.340	21 Orang	1.047.958.000,00		373.132.800	36%	0,3561	47	536.630.832	0	1.112.919.972	39%	0,394225
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100	1.674.547.483	0	66.376.780	0	681.300.000	0	128.648.822	19%	0,1888		346.000.000		541.025.602	32%	0,323088
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	21	612.630.820		37.317.380	78 Unit	522.000.000,00		62.013.722	12%	0,1188	16	118.000.000	0	217.331.102	35%	0,354751
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Peralatan dan Mesin Kantor	395	208.000.000		17.850.000	84 Unit	159.300.000,00		66.635.100	42%	0,4183	75	38.000.000	0	122.485.100	59%	0,588871
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	8	853.916.662		11.209.400							8	190.000.000	0	201.209.400	24%	0,235631

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 90 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toba Samosir dinyatakan bahwa Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten, dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Balige, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Balige dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Toba;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Sosial Kemasyarakatan.

Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Balige Tahun 2021 cukup menggembirakan, meskipun dalam anggaran telah beberapa kali diadakan refocusing. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Balige yang dapat terealisasi sebesar 78% dari target yang telah ditentukan. Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Balige Tahun 2021-2026 sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA), yaitu Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Balige dapat dilihat dari **Tabel TC.30** pada lampiran.

Tabel TC.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balige Kabupaten Toba
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BALIGE
KABUPATEN TOBA

NO	Indikator	SPM/Stan dar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KECAMATAN BALIGE											
1	Persentase peningkatan tata kelola Pemerintahan Kecamatan			88	93	95	97	84	21%	95	97	
2	<i>Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik</i>			51	67	74	84	52	0%	74	84	
3	<i>Persentase Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan</i>			89	100	100	100	67	0%	100	100	
4	<i>Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Umum</i>			100	100	100	100	100	25%	100	100	
5	<i>Persentase Desa dan Kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi</i>			100	100	100	100	100	0%	100	100	
	<i>Persentase layanan administrasi yang tertangani</i>			100	100	100	100	100	4%	100	100	

2.3 isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang ada di Kecamatan Balige dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap tugas dan fungsi Pemerintahan, Perekonomian, Kesra, dan Pelayanan Umum, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Pelayanan Publik yang disebabkan:

- a. Belum optimalnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Desa sebagai penunjang pelayanan;
- b. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Masih rendahnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat dalam administrasi pelayanan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Balige secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

1. Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:

Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

2. Pembinaan Perangkat, memiliki permasalahan:

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa dan juga bagi Pegawai di Kelurahan serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a) Perlu pelatihan/pembinaan perihal peningkatan kapasitas SDM perangkat Pemerintah Desa dan juga di Kelurahan;
- b) Pengalokasian Anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;

- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk Hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten Malang dan praktisi hukum.

b. Bidang Perekonomian, Kesra, dan Pelayanan Umum

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Data Masyarakat miskin yang belum valid;
- 3) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam Karang Taruna di masing-masing wilayah;
- 4) Masih banyaknya pengajuan proposal baik di bidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang belum direalisasi.

Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan peran institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan kesehatan oleh Dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatankegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa dan juga Lurah untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
- 3) Terus dilakukan validasi data penduduk miskin mulai tingkat desa/kelurahan;
- 4) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 5) Telah diupayakan verifikasi dan update data terkait keluarga miskin supaya data lebih valid.

c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Minimnya sosialisasi dari stakeholder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 2) Redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh Desa banyak yang belum mengerti.
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah

- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat Desa untuk menjaga kebersihan lingkungan;

Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan stakeholder atau Dinas Terkait;
- 2) Mengenai redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Toba, namun secara umum pelaksanaan ADD di Kecamatan Balige tidak ada permasalahan;
- 3) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta Karang Taruna yang ada di wilayah desa/kelurahan guna menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda;
- 4) Mengadakan kegiatan gotong royong dengan melibatkan masyarakat baik di Desa/Kelurahan.

d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan dan kebersihan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masyarakat yang belum mengerti bahayanya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan para pelaku usaha.

Upaya yang dilakukan antara lain:

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan melakukan koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit operasional penanggulangan bencana dan pembentukan Satuan Tugas dan Linmas Desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan sosialisasi tentang bahayanya Miras dan Narkoba secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan para pelaku usaha

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebelum menetapkan RENJA Kecamatan Balige Tahun 2023 terlebih dahulu dilakukan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD yaitu dengan membuat perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dengan melakukan review terdapat beberapa program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD. Pada Rancangan awal RKPD Kecamatan Balige, Program Kecamatan Balige ada sebanyak 5 (Lima) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan, dan 25 (Dua puluh lima) Sub Kegiatan. **(Tabel TC.31)**

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Toba

Kecamatan Balige

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KEC.BALIGE	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	8.003.090.706	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KEC.BALIGE	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	8.003.090.706	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KEC.BALIGE	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	57.800.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KEC.BALIGE	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	57.800.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KEC.BALIGE	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	57.800.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KEC.BALIGE	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	57.800.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KEC.BALIGE	Cakupan layanan administrasi keuangan	100 persen	5.891.061.300	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KEC.BALIGE	Cakupan layanan administrasi keuangan	100 persen	5.891.061.300	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KEC.BALIGE	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	5.891.061.300	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KEC.BALIGE	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	5.891.061.300	

2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KEC.BALIGE	Cakupan layanan administrasi umum	100 persen	717.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KEC.BALIGE	Cakupan layanan administrasi umum	100 persen	717.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KEC.BALIGE	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KEC.BALIGE	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	150.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KEC.BALIGE	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	54.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KEC.BALIGE	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	54.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KEC.BALIGE	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	64.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KEC.BALIGE	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	64.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KEC.BALIGE	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	34.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KEC.BALIGE	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	34.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KEC.BALIGE	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	130.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KEC.BALIGE	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	130.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KEC.BALIGE	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	285.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KEC.BALIGE	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	285.000.000	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KEC.BALIGE	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	100 persen	219.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KEC.BALIGE	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	100 persen	219.000.000	

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KEC.BALIGE	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	34.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KEC.BALIGE	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	34.000.000	
	Pengadaan Mebel	KEC.BALIGE	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	160.000.000	Pengadaan Mebel	KEC.BALIGE	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	160.000.000	
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KEC.BALIGE	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	25.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KEC.BALIGE	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	25.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEC.BALIGE	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100 persen	769.229.406	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEC.BALIGE	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100 persen	769.229.406	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KEC.BALIGE	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.850.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KEC.BALIGE	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.850.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KEC.BALIGE	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	212.649.649	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KEC.BALIGE	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	212.649.649	
5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KEC.BALIGE	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	552.729.757	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KEC.BALIGE	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	552.729.757	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEC.BALIGE	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 persen	349.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEC.BALIGE	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 persen	349.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KEC.BALIGE	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	120.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KEC.BALIGE	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	120.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KEC.BALIGE	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	39.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KEC.BALIGE	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	39.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KEC.BALIGE	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	190.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KEC.BALIGE	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	190.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC.BALIGE	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	100 Persen	343.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC.BALIGE	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	100 Persen	343.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KEC.BALIGE	Persentase jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen	173.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KEC.BALIGE	Persentase jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen	173.000.000	

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KEC.BALIGE	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	173.000.000		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KEC.BALIGE	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	173.000.000	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	KEC.BALIGE	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	100 persen	170.000.000		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	KEC.BALIGE	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	100 persen	170.000.000	
	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	KEC.BALIGE	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	100 Unit	170.000.000		Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	KEC.BALIGE	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	100 Unit	170.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KEC.BALIGE	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 Persen	4.506.000.000		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KEC.BALIGE	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 Persen	4.506.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KEC.BALIGE	Persentase jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan	100 persen	76.000.000		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KEC.BALIGE	Persentase jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan	100 persen	76.000.000	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	KEC.BALIGE	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	76.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	KEC.BALIGE	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	76.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KEC.BALIGE	Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	6 Kelurahan	4.430.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KEC.BALIGE	Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	6 Kelurahan	4.430.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KEC.BALIGE	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	1.000.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KEC.BALIGE	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	1.000.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KEC.BALIGE	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	3.430.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KEC.BALIGE	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	3.430.000.000	
	PROGRAM					PROGRAM					
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KEC.BALIGE	Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	100 Persen	28.000.000	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KEC.BALIGE	Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	100 Persen	28.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KEC.BALIGE	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100 persen	28.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KEC.BALIGE	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100 persen	28.000.000	

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	KEC.BALIGE	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Dokumen	28.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	KEC.BALIGE	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Dokumen	28.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KEC.BALIGE	Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa	100 Persen	57.600.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KEC.BALIGE	Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa	100 Persen	57.600.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KEC.BALIGE	Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi	29 Desa	57.600.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KEC.BALIGE	Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi	29 Desa	57.600.000	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	KEC.BALIGE	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	29 Dokumen	26.300.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	KEC.BALIGE	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	29 Dokumen	26.300.000	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	KEC.BALIGE	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	29 Laporan	31.300.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	KEC.BALIGE	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	29 Laporan	31.300.000	
	TOTAL				12.937.690.706	TOTAL				12.937.690.706	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagaimana kita ketahui bahwa proses pelaksanaan Pembangunan terlebih dahulu dilengkapi dengan data usulan dan rencana Pembangunan yang tentu menjadi skala prioritas dan realistis dilaksanakan dan benar-benar dibutuhkan masyarakat. Kecamatan Balige dalam merancang program dan kegiatan pembangunan satu tahun kedepan pasti mempertimbangkan proses pembangunan yang sedang berlangsung, hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan dimana ditampung seluruh proses aspirasi masyarakat, hasil reses DPRD maupun para pemangku kepentingan. Selanjutnya disusun dalam suatu *blue print* atau Data Pembangunan Kecamatan Balige untuk dirumuskan dan dibahas dalam forum musyawarah. Hasil forum musyawarah dimaksud menjadi Dokumen Pembangunan Kecamatan Balige yang diusulkan dan dibawa dalam Musrenbang Kabupaten untuk dapat ditampung menjadi Program dan kegiatan Pembangunan yang ditampung baik dari Dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN maupun dana bantuan dari masyarakat/stake holder. **(Tabel TC.32)**

Tabel TC.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Toba

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepentingan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi

pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sociocultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten yang dipimpin oleh Bupati. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni : *pertama*, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan *kedua*, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam penyusunan RENJA 2023 Kecamatan Balige, senantiasa menelaah terhadap Kebijakan Nasional sehingga pada gilirannya pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Balige senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prioritas pembangunan yang dikaitkan dengan tupoksi Kecamatan Balige, yaitu:

a. Bidang Pemerintahan

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan Kecamatan. Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan dituntut untuk lebih meningkatkan SDM dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan PP No.72 Tahun 2005. Dimana pelaksanaannya meningkatkan koordinasi sinergi dan integrasi dalam pemerintahan yang pada prakteknya di Kecamatan Balige harus meningkatkan capaian kinerja aparatur itu sendiri akan meningkatkan persentasi layanan administrasi yang tertangani.

b. Bidang Pembangunan

- 1) Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah di Kecamatan Balige dihasilkan melalui Musrenbang Kecamatan yang merupakan

usulan-usulan prioritas pembangunan dari masyarakat di desa dan Kelurahan, sehingga pada gilirannya diperoleh dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan Balige.

2) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam membangun Desa, sebagai cermin pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

3) Pembangunan Infrastruktur Desa

Dalam rangka percepatan peningkatan perekonomian desa perlu didukung oleh pembangunan infrastruktur desa yang memadai agar hasil bumi dari desa dapat terangkut ke lokasi pemasaran.

4) Meningkatkan sarana dan prasarana publik

5) Peningkatan Peran Serta Gender dalam Pembangunan, khususnya dalam pembinaan keluarga.

6) Pengembangan data/informasi dan statistik daerah, sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di desa kelurahan melalui profil desa/kelurahan dan Kecamatan Balige.

c. Bidang Kemasyarakatan

1) Pembinaan Organisasi Kepemudaan, yang menitikberatkan pembinaan organisasi kepemudaan sebagai generasi penerus bangsa untuk menciptakan pemuda yang sehat, solid, mandiri dan kreatif .

2) Kerjasama informasi dan media massa, yang bertujuan menyebarkan informasi oleh pemerintah Kecamatan Balige kepada masyarakat yang sifatnya penyuluhan dan himbauan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Balige terkait dengan misi RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 terutama misi kedua yaitu:

“Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Unggul dan Andal”

Sehubungan dengan penjabaran misi dimaksud maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Balige adalah:

“Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di Kecamatan”

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Balige dalam jangka waktu satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam Rencana Strategis dalam jangka waktu lima tahun mendatang dengan periode pembangunan 2021-2026 kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dalam jangka waktu satu tahun mendatang dengan periode pembangunan 2023 antara lain: **“Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan”**

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Balige, maka pada Tahun 2021 Kecamatan Balige melaksanakan sebanyak 5 (Lima) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan, dan 32 (Tiga Puluh Dua) Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

- Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

III. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. *Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*

- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

V. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

- Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

TC. 33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KECAMATAN BALIGE**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikat or	Rencana Tahun 2023				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
7				UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01			KECAMATAN									
7	01	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		100 Persen	8,003,090,706			100 Persen	8,063,172,910

7	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	persen		100 persen	57,800,000			100 persen	58,800,000
7	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Toba, Balige, Semua Kelurahan	6 Dokumen	57,800,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	58,800,000
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	persen		100 persen	5,891,061,300			100 persen	5,920,516,607
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Toba, Balige, Semua Kelurahan	70 Orang/bulan	5,891,061,300			70 Orang/bulan	5,920,516,607
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	persen		100 persen	717,000,000			100 persen	733,300,000

7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Toba, Balige, Semua Kelurahan	6 Paket	150,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Paket	155,000,000
7	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kab. Toba, Balige, Semua Kelurahan	5 Paket	54,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	56,000,000
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Toba, Balige, Semua Kelurahan	2 Paket	64,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	64,300,000
7	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		Kab. Toba, Balige, Semua Kelurahan	7 Dokumen	34,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Dokumen	34,000,000

7	01	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Toba, Balige, Semua Kelurahan	1 Laporan	130,000,000			1 Laporan	134,000,000
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Toba, Balige, Semua Kelurahan	2 Laporan	285,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	290,000,000
7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	persen		100 persen	219,000,000			100 persen	224,500,000
7	01	001	2.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Kab. Toba, Balige, Semua Kelurahan	1 Unit	34,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	34,000,000

7	01	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kab. Toba, Balige, Semua Kelurahan	12 Unit	160,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Unit	165,000,000
7	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Toba, Balige, Semua Kelurahan	5 Unit	25,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	25,500,000
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	persen		100 persen	769,229,406			100 persen	773,056,303
7	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Toba, Balige, Semua Kelurahan	1 Laporan	3,850,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	3,850,000

7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Toba, Balige, Semua Kelurahan	4 Laporan	212,649,649	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	213,712,897
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Toba, Balige, Semua Kelurahan	2 Laporan	552,729,757	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	555,493,406
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	persen		100 persen	349,000,000			100 persen	353,000,000
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kab. Toba, Balige, Semua Kelurahan	17 Unit	120,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Unit	122,000,000

7	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Toba, Balige, Semua Kelurahan	5 Unit	39,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	40,000,000
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Toba, Balige, Semua Kelurahan	2 Unit	190,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	191,000,000
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persen		100 Persen	343,000,000			100 Persen	350,000,000
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persen		100 persen	173,000,000			100 persen	175,000,000

7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kab. Toba, Balige, Semua Kelurahan	7 Laporan	173,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Laporan	175,000,000
7	01	002	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	persen		100 persen	170,000,000			100 persen	175,000,000
7	01	002	2.03	002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta		Kab. Toba, Balige, Semua Kelurahan	100 Unit	170,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Unit	175,000,000
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Persen		100 Persen	4,506,000,000			100 Persen	4,667,000,000

7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan	persen		100 persen	76,000,000			100 persen	77,000,000
7	01	003	2.01	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kab. Toba, Balige, Semua Kelurahan	10 Laporan	76,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Laporan	77,000,000
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	Kelurahan		6 Kelurahan	4,430,000,000			6 Kelurahan	4,590,000,000
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Unit	1,000,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Unit	1,040,000,000

7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kab. Toba, Balige, Semua Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	3,430,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Pokmas / Ormas	3,550,000,000
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	Persen		100 Persen	28,000,000			100 Persen	29,000,000
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	persen		100 persen	28,000,000			100 persen	29,000,000
7	01	005	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Kab. Toba, Balige, Semua Kelurahan	5 Dokumen	28,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	29,000,000
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa	Persen		100 Persen	57,600,000			100 Persen	59,000,000

7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi	Desa		29 Desa	57,600,000			29 Desa	59,000,000
7	01	006	2.01	001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Toba, Balige, Semua Kelurahan		29 Dokumen	26,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		29 Dokumen	27,000,000
7	01	006	2.01	017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Toba, Balige, Semua Kelurahan		29 Laporan	31,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		29 Laporan	32,000,000
TOTAL													13,168,172,910	

TC.33A
PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN BALIGE
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Sumber Dana	OPD Penanggung jawab	Jenis Kegiatan
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
									Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
7	0	1			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN		Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	Kec. Balige											
7	0	1	00	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase layanan administrasi yang tertangani	Kec. Balige	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%			100 Pe rsen	8,003,090,706	8,063,172,910	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kec.Balige		
7	0	1	00	1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kec. Balige			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100 pe rsen	57,800,000	58,800,000				
7	0	1	00	1	2.0 1	00 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Balige					Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Doku men	57,800,000	58,800,000			

7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kec. Balige			<i>Cakupan layanan administrasi keuangan</i>	100%		100 persen	5,891,061,300	5,920,516,607				
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kec. Balige						Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	5,891,061,300	5,920,516,607			
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kec. Balige			<i>Cakupan layanan administrasi umum</i>	100%		100 persen	717,000,000	733,300,000				
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. Balige						Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Paket	150,000,000	155,000,000			
7	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kec. Balige						Peralatan rumah tangga	5 Paket	54,000,000	56,000,000			
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kec. Balige						Cetakan dan penggandaan	2 Paket	64,000,000	64,300,000			
7	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kec. Balige						Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7 Dokumen	34,000,000				
7	01	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kec. Balige						Kunjungan Tamu	1 Laporan	130,000,000	134,000,000			
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kec. Balige						Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2 Laporan	285,000,000	290,000,000			
7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Kec. Balige			<i>Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur</i>	100%		100 persen	219,000,000	224,500,000				

7	01	001	2.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 Unit	34,000,000	34,000,000			
7	01	001	2.07	005	Pengadaan Mebel								Mebel	12 Unit	160,000,000	165,000,000			
7	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								Peralatan dan mesin lainnya	5 Unit	25,000,000	25,500,000			
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								<i>Jasa Penunjang Kinerja Aparatur</i>	100 persen	769,229,406	773,056,303			
7	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,850,000	3,850,000			
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	212,649,649	213,712,897			
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Laporan	552,729,757	555,493,406			
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								<i>Barang Milik Daerah yang Terpelihara</i>	100 persen	349,000,000	353,000,000			
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	17 Unit	120,000,000	122,000,000			

7	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kec. Balige				Peralatan dan Mesin Kantor	5 Unit	39,000,000	40,000,000			
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kec. Balige				Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	2 Unit	190,000,000	191,000,000			
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik	Kec. Balige	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	100%			100 Persen	343,000,000	350,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kec. Balige	
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kec. Balige			<i>Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>7 Kegiatan</i>	100 persen	173,000,000	175,000,000			
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Kec. Balige				Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	173,000,000	175,000,000			
7	01	002	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			Kec. Balige			<i>Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik</i>	<i>100%</i>	100 persen	170,000,000	175,000,000			

7	01	002	2.03	002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta			Kec. Balige				Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	100 Unit	170,000,000	175,000,000			
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan	Kec. Balige	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	35 Desa/Kelurahan			100 Persen	4,506,000,000	4,667,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kec. Balige	
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Kec. Balige		<i>Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan</i>	6 Kegiatan		100 persen	76,000,000	77,000,000			
7	01	003	2.01	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kec. Balige				Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa/ Kelurahan	10 Laporan	76,000,000	77,000,000			
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Kec. Balige		<i>Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan</i>	6 Kelurahan		6 Kelurahan	4,430,000,000	4,590,000,000			
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Kec. Balige				Jumlah infrastruktur/sarana/prasarana kelurahan yang dibangun	18 Unit	1,000,000,000	1,040,000,000			

7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kec. Balige				Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	6 Pokmas / Ormas	3,430,000,000	3,550,000,000			
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Umum	Kec. Balige	Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	100%			100 Persen	28,000,000	29,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kec. Balige	
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Kec. Balige			Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	1 Kegiatan	100 persen	28,000,000	29,000,000			
7	01	005	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Kec. Balige				Jumlah kegiatan Forkopimca yang difasilitasi	5 Dokumen	28,000,000	29,000,000			
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa dan Kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi	Kec. Balige	Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa	35 Desa/Kelurahan			100 Persen	57,600,000	59,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kec. Balige	
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Kec. Balige			Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi	35 Desa/Kelurahan	29 Desa	57,600,000	59,000,000			

7	01	006	2.01	001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							Jumlah Perdes dan Perkades yang dievaluasi	29 Dokumen	26,300,000	27,000,000			
7	01	006	2.01	017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya							Jumlah Desa dan Kelurahan yang difasilitasi Kecamatan	29 Laporan	31,300,000	32,000,000			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran dari Renstra Kecamatan Balige, maka disusun program kerja Kecamatan Balige dengan memperhatikan visi misi Kabupaten Toba yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten, dan program kegiatan yang menjadi skala prioritas.

Program dan Kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balige Tahun 2023 terdiri dari sebanyak 5 (Lima) Program, 12 (Dua Belas) Kegiatan, dan 26 (Dua puluh Enam) Sub Kegiatan, yakni:

I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

2. *Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*

- Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa

2. *Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

III. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

V. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4.2 PENDANAAN INDIKATIF

Untuk pendanaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balige pada tahun 2023 adalah berasal dari Dana Alokasi Transfer Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toba.

BAB V

PENUTUP

RENJA Kecamatan Balige Kabupaten Toba Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikator perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan RENJA Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RENJA Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya RENJA Tahun 2023, maka akan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikator perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba .

CAMAT BALIGE,

PANTUN JOSUAPARDEDE, S.Sos, M.Si
NIP. 19760512 200212 1 004